

PERKEMBANGAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI INDONESIA PERIODE 1994-2008

Ferry Firmansyah

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: Ferry_ajjah@yahoo.co.id

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pembangunan ekonomi nasional menuju era industrialisasi sangat memerlukan peran tenaga kerja Indonesia yang memiliki daya saing serta produktivitas yang tinggi. Pendidikan merupakan kunci dalam menciptakan tenaga kerja Indonesia yang lebih produktif. Pemerintah berupaya dalam meningkatkan pendidikan masyarakat melalui program wajib belajar 9 tahun. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa latar belakang pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun; (2) bagaimana hasil pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sampai dengan ketuntasannya berdasarkan pencapaian partisipasi anak sekolah. Tujuan penelitian adalah (1) untuk menjelaskan latar belakang pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun; (2) untuk menganalisis hasil pelaksanaan wajib belajar 9 tahun berdasarkan partisipasi sekolah. Metode penelitian melalui pendekatan deskriptif historis yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan melalui program wajib belajar 9 tahun dalam rangka menuju persaingan industrialisasi. Indikator pencapaiannya dapat dilihat melalui APK SD/MI mencapai 115,51% dan APK SMP/MTs mencapai 98,11% di tahun 2008 sehingga dinyatakan tuntas karena sesuai dengan kriteria Tuntas Paripurna.

Kata kunci: Wajib Belajar, Produktivitas, Angka Partisipasi Kasar (APK)

Abstract

National economic development towards industrialization era really need the role of Indonesian workers who have the competitiveness and high productivity. Education is key in creating a workforce that is more productive Indonesia. Government seeks to improve public education through 9-year compulsory education program. The problem in this study were (1) what background the government announced a 9-year compulsory education, (2) how the results of the implementation of the 9-year compulsory education up to the thoroughness based on the achievement of school children's participation. Methods of historical research through a descriptive approach consists of several steps, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Quality of public education in order to the industrialization of competition can be enhanced through the 9-year compulsory education program. Indicators of achievement can be seen through the APK SD / MI reached 115.51% and SMP / MTs reached 98.11% in 2008, so the otherwise completed in accordance with the criteria for Plenary Completed.

Keywords: Compulsory Education, Productivity, Gross Enrolment Ratio (GER)

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan yang diusahakan oleh pemerintah belum sepenuhnya membawa hasil yang positif, karena sumber daya manusia Indonesia dinilai masih kurang berkualitas dan kompetitif dibandingkan dengan sumber daya manusia bangsa lain. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa kualitas tenaga kerja Indonesia

kalah bersaing jika dibandingkan dengan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia. Mayoritas tenaga kerja

Indonesia hanyalah sebagai tenaga kasar, sedangkan kebanyakan tenaga ahli dipegang oleh tenaga asing yang dinilai lebih kompeten dan produktif. Era globalisasi menuntut pada setiap negara agar bisa membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global. Indonesia menjadi bagian yang harus mempersiapkan sumber daya manusia

Indonesia yang berkualitas sebagai modal dalam rangka pembangunan nasional. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mandiri tanpa mengandalkan impor, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia mutlak diperlukan sebagai bagian dari upaya melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Tenaga kerja yang berpendidikan SD mempunyai kesejahteraan yang kurang baik karena tingkat pendapatan ekonomi mereka dinilai masih rendah, sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke atas mempunyai kesejahteraan dan pendapatan ekonomi yang lebih baik dan layak daripada tenaga kerja yang berpendidikan SD. Hal tersebut terjadi karena tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke atas memiliki kompetensi lebih baik dan dinilai lebih produktif daripada tenaga kerja yang berpendidikan SD. Jadi tidak mengherankan jika pendapatan ekonomi tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke atas dan SD memiliki perbedaan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan dasar adalah dengan mencanangkan dan melaksanakan program wajib belajar 9 tahun sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar tercipta SDM Indonesia yang lebih produktif dan berkompoten sehingga mampu membawa Indonesia sebagai negara yang beradab, berbudaya, serta unggul dalam IPTEK dan berprestasi dalam berbagai bidang.

Penulis sangat tertarik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dari awal dicanangkan sampai dengan dinyatakan tuntas di tahun 2008 karena belum ada penulis yang membahas tentang masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat umum agar memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan hidup di masa depan, terutama untuk berpartisipasi dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan dasar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.¹ Pada tahap heuristik, sumber primer yang berhasil dikumpulkan untuk penulisan jurnal ini antara lain: UU No. 2 Tahun 1989, PP No. 28 Tahun 1990, Inpres No. 1 Tahun 1994, dan UU No. 20 Tahun 2003. Sumber tersebut diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan internet dengan alamat web https://www.google.com/nama_sumber_di_atas. Peneliti melakukan kritik intern dengan membandingkan kebenaran isi sumber tersebut dengan sumber lainnya untuk memperoleh fakta sejarah yang benar.

Fakta sejarah yang sudah didapatkan dari berbagai sumber, selanjutnya dicari hubungannya dengan tema penelitian wajib belajar 9 tahun, kemudian peneliti menginterpretasikan hubungan antar fakta sejarah sehingga memunculkan suatu narasi sejarah. Pada tahap

historiografi, peneliti menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk karya tulis seperti pada jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pencanangan Wajib Belajar 9 Tahun

Selama PJPT I, bangsa Indonesia bekerja keras dalam membangun pendidikan sehingga mengalami kemajuan pesat. Ketika memulai Repelita I (1969), pendidikan umumnya masih rendah. Rata-rata 40 dari 100 penduduk usia 10 tahun ke atas tidak bisa membaca dan menulis. Ketika mengawali PJPT II, jumlah buta aksara rata-rata tinggal 8 dari 100 penduduk.² Angka partisipasi pendidikan meningkat menjadi 90 persen.³ Jumlah sekolah dan pendidik juga mengalami peningkatan di semua jalur, jenis, dan jenjang.

Pada tahun 1984, pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Gerakan ini membawa hasil yang memuaskan bahwa setiap tahunnya jumlah lulusan SD semakin meningkat. Alasan tersebut yang mendorong pemerintah memutuskan melanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah menetapkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional di dalamnya memuat Pasal 14 Ayat (2) yang mewajibkan anak berumur 7 tahun ke atas wajib menyelesaikan pendidikan dasar, undang-undang tersebut sebagai titik awal perintisan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1990 yang menetapkan pendidikan dasar selama 9 tahun dengan mengintegrasikan sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat ke dalam 1 jenjang.

Alasan paling utama yang mendasari pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun adalah adanya deklarasi bersama "Education for All" di Jom Tien pada 1990 menetapkan fungsi pendidikan dasar yang wajib untuk semua warga negara adalah agar peserta didik dapat menjadi anggota masyarakat yang dapat bertahan hidup, mengembangkan potensi diri, berpartisipasi dalam masyarakat, memperoleh pekerjaan, dan belajar sepanjang hayat.⁴

Data dari Depnaker tahun 1993, hampir 80% tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD, 40% lulusan SLTP, dan seterusnya persentase itu semakin mengecil pada jenjang SLTA dan perguruan tinggi.⁵ Faktor

² Kompas, *Presiden Tekankan, Gerakan Wajib Belajar 9 tahun Harus Sukses*, (Edisi Senin, 2 Mei 1994), hlm. 1

³ *Ibid.*, hlm. 1

⁴ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Kompas Media Sarana, 2008), hlm. 60

⁵ A. Daliman, "Gerakan wajib belajar sebagai realisasi prinsip pendidikan untuk semua, hakikat serta tantangannya" dalam jurnal pendidikan vol. 17 no. 10

¹ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press, hlm: 11

pendidikan juga memiliki nilai kontribusi dengan produktivitas nasional, hal ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan pendidikan berimplikasi positif terhadap pendapatan produksi nasional. Misalkan peningkatan pendidikan di Amerika Latin pada tahun 1964, telah mampu mengontrol peningkatan produksi nasional negara-negara di wilayah tersebut mencapai sebesar 5 sampai 25 persen.⁶

Program wajib belajar 9 tahun dicanangkan oleh presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994 yang ditandai dengan keluarnya Inpres No. 1 Tahun 1994. Program tersebut membutuhkan biaya yang amat besar sehingga pemerintah belum dapat memikulnya sendiri, maka pemerintah akan menanggung sebagian biaya lewat penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan SPP. Dengan kata lain masyarakat juga turut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini.

Pada tahun 2003, pemerintah menetapkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, didalam Pasal 6 Ayat (1) mewajibkan anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP No. 47 Tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Gerakan wajib belajar 9 tahun sangat mendasar dan akan menopang keberhasilan PJPT II sebab sebagian besar tenaga kerja hanya berpendidikan SD, padahal untuk menunjang perkembangan ekonomi melalui industrialisasi, mayoritas tenaga kerja yang hanya berpendidikan SD dinilai tidak memadai.⁷ Peningkatan wajib belajar 6 tahun menjadi wajib belajar 9 tahun untuk menyiapkan anak-anak dan remaja untuk lebih siap bekerja secara produktif melalui bekal pendidikan.

Gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan gerakan massal untuk mengangkat tingkat pendidikan masyarakat secara bersama-sama dalam suatu kurun waktu tertentu. Berbeda dengan gerakan pemberantasan buta huruf, gerakan wajib belajar lebih mendasar sifatnya, dan merupakan gerakan *universal education* sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada sanksi. Melalui gerakan wajib belajar, semua anggota masyarakat diberi hak yang sama untuk mengikuti pendidikan. Tidak adanya sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya juga berkaitan dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang bisa disediakan pemerintah.

Pemerintah berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran di SD dan SMP

(Edisi khusus dies Mei 1995), (Jakarta: Cakrawala Pendidikan), hlm. 138

⁶ Kompas, Tajuk Rencana, *Sikap Kritis Mendukung Program Wajib Belajar Sembilan Tahun*, (Edisi Senin, 2 Mei 1994), hlm. 4

⁷ Kompas, *Presiden Tekankan, loc. cit.*, hlm. 1

dalam rangka mensukseskan program wajib belajar 9 tahun, salah satu contoh bahwa pemerintah telah menganggarkan pembangunan seluruh SMP negeri sebesar Rp 15 Milyar pada tahun 1994.⁸ Gerakan wajib belajar 9 tahun menjadi gerakan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan pemerintah. Sebagai penunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Pemerintah mulai tahun ajaran 1994/1995 menghapuskan SPP untuk seluruh SMP negeri, bukan berarti masyarakat tidak perlu lagi membiayai operasionalisasi SMP negeri.⁹ Dana SPP hanya seperempat dari dana operasional pendidikan. Menteri pendidikan dan kebudayaan Wardiman Djojonegoro mengemukakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 56 milyar sebagai dana pengganti SPP, sedangkan bagi sekolah swasta, pemerintah tetap akan memberikan bantuan sekalipun jumlahnya tidak besar.¹⁰

2. Hasil Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun

Kondisi dan tingkat pencapaian pembangunan pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah bersama orang tua dan masyarakat yang berkaitan dengan aspek perluasan dan pemerataan pendidikan dapat dilihat pada indikator pemerataan pendidikan dasar, yaitu angka partisipasi. Keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat dilihat dari indikator pencapaian. Indikator utamanya adalah pencapaian APK SD/MI dan SMP/MTs¹¹.

Ketetapan bank dunia, keberhasilan penuntasan program wajib belajar 9 tahun jika indikator pencapaian adalah kinerja APK untuk tingkat SD dan SMP sebesar 90%.¹² Tingkat ketuntasan dalam melaksanakan program Wajar Dikdas 9 Tahun dikategorikan sebagai berikut:

“(1) Tuntas Pratama, bila APK mencapai 80% s.d. 84%; (2) Tuntas Madya, bila APK SD/MI atau APK SMP/MTs mencapai 85 % s.d. 89%; (3) Tuntas Utama, bila APK mencapai 90% s.d. 94%; (4) Tuntas Paripurna, bila APK mencapai minimal 95%”¹³

⁸ Kompas, *Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Masyarakat Diimbau Ikut Biayai Bangun Gedung SMP*, (Edisi Senin, 2 Mei 1994), hlm. 13

⁹ Kompas, *Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Masyarakat Diimbau Ikut Biayai Bangun Gedung SMP*, (Edisi Senin, 2 Mei 1994), hlm. 13

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13

¹¹ Kompas, Tajuk Rencana, *op. cit.*, hlm. 7

¹² M.Husin, “*Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta*” dalam jurnal pendidikan vol. 5 no. 4 (edisi 18 Oktober 2005), (Jakarta: Widyatama), hlm. 95

¹³ Sri Buwono, “*Suatu Pendekatan Sosialisasi dan Advokasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di*

Pemerataan dan perluasan pendidikan sebaiknya bukan hanya diukur dari seberapa banyak jumlah sarana-prasarana belajar tetapi juga menyangkut persebaran sarana-prasarana pendidikan antar sekolah dan antar daerah sehingga sangat mendukung partisipasi anak untuk bersekolah. Beberapa indikator yang merupakan kategori angka partisipasi adalah sebagai berikut:

“(1) Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik secara agregat maupun menurut karakteristik siswa; (2) Angka partisipasi murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan; (3) Angka partisipasi sekolah (APS), yaitu jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang merepresentasikan satuan pendidikan”¹⁴

Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dapat menunjukkan adanya anak diluar kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. mereka adalah anak yang berusia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun. Sesuai dengan prioritas program WAJAR DIKDAS 9 tahun, adanya anak-anak berumur kurang dari 7 tahun tetapi sudah bersekolah di jenjang SD/MI dapat terjadi karena sekolah tersebut dapat menampung siswa. Disisi lain, ada anak-anak berusia diatas 12 tahun yang masih bersekolah di jenjang SD/MI dapat disebabkan oleh 2 kemungkinan, yaitu pertama anak-anak itu terlambat masuk SD atau mereka masuk diatas umur 7 tahun, dan kedua adanya anak-anak yang mengulang kelas sehingga mereka baru dapat menyelesaikan jenjang SD/MI pada usia diatas 12 tahun. Perluasan pemerataan pendidikan dasar dapat dilihat di tabel tentang perkembangan angka partisipasi baik APK, APM, dan APS sebagai hasil pencapaian program wajib belajar 9 tahun.

Pemerintah menetapkan PP No. 47 Tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Pasal 14 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 1989 dan Pasal 34 Ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003. Kedua pasal tersebut mengamanatkan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun diatur dalam peraturan pemerintah.

Tabel
APS, APK, dan APM tingkat SD/MI dan SMP/MTs Nasional (%)

Indikator	1994	1998	2002	2006	2008
-----------	------	------	------	------	------

Kabupaten Kubu Raya”, dalam jurnal pendidikan vol. 2 no. 2, (edisi Oktober 2011), (Pontianak: FKIP Universitas Tanjungpura), hlm. 210

¹⁴ Kedeputian evaluasi kinerja pembangunan Badan Perencana Pembangunan Nasional, *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*, (Bappenas, 2009), hlm. 3

APS 7-12 th SD/MI	94.06	95.06	96.10	97.39	97.83
APS 13-15 th SMP/MTs	72.39	77.16	79.21	84.08	84.41
APK SD/MI	107.13	107.60	105.99	109.96	115.51
APK SMP/MTs	64.36	73.14	79.81	88.87	98.11
APM SD/MI	92.11	92.09	92.70	93.54	93.99
APM SMP/MTs	50.03	56.96	61.64	66.52	74.52

Sumber: BPS-RI (susenas 2003-2010)

APS, APK, dan APM merupakan angka partisipasi yang mencerminkan partisipasi anak sekolah jalur pendidikan formal baik dibawah naungan kementerian pendidikan maupun kementerian agama yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan tabel, periode 1994-2008 APS usia 7-12 tahun tingkat SD/MI dan usia 13-15 tahun tingkat SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut dinilai akibat dari membaiknya pendapatan masyarakat yang dapat dinilai melalui perbaikan angka kemiskinan, jadi dengan semakin membaiknya ekonomi masyarakat maka semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Hal ini juga diikuti oleh perbaikan APK dan APM tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia 7-15 tahun.

Penurunan angka partisipasi terjadi pada tahun 1998, APS usia 7-12 tahun tingkat SD/MI dan 13-15 tahun tingkat SMP/MTs, APK dan APM tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan. APS 7-12 tahun menurun sebesar 0,31% dari tahun 1997 menjadi 95,06% di tahun 1998, sedangkan APS 13-15 tahun menurun sebesar 0,35% dari tahun 1997 menjadi 77,16% di tahun 1998. APK SD/MI menurun sebesar 0,44% dari tahun 1997 menjadi 107,60% di tahun 1998, sedangkan APK SMP/MTs menurun sebesar 1,04% dari tahun 1997 menjadi 73,14% di tahun 1998. APM SD/MI menurun sebesar 0,25% dari tahun 1997 menjadi 92,09% di tahun 1998, sedangkan APM SMP/MTs menurun sebesar 0,88% dari tahun 1997 menjadi 56,96% di tahun 1998.

Penurunan APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, serta APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs di tahun 1998 diakibatkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk pada tahun tersebut, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kuatnya ketergantungan manusia terhadap uang sehingga dengan adanya krisis ekonomi berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan, termasuk

didalamnya adalah aspek pendidikan.¹⁵ Semakin tinggi angka kemiskinan, maka akan sangat mempengaruhi partisipasi sekolah karena penyelenggaraan pendidikan masih membutuhkan biaya besar yang sebagian harus ditanggung masyarakat, jika ekonomi masyarakat sangat rendah maka pemenuhan terhadap kebutuhan pendidikan akan dikesampingkan melihat kecenderungan mayoritas masyarakat yang lebih mengutamakan kebutuhan pangan.

Pada tahun 1999-2002, ekonomi Indonesia mengalami perbaikan pasca krisis ekonomi 1998. Perlahan namun pasti angka APS usia 7-12 tahun, APK SMP/MTs, APM SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan meningkat, sedangkan APS usia 13-15 tahun dan APK SD/MI sempat mengalami penurunan pada tahun 2000 sampai 2002. APS usia 13-15 tahun menurun sebesar 0,23% dari tahun 2000 menjadi 79,35% di tahun 2001, kemudian menjadi 79,21% di tahun 2002. APK SD/MI menurun sebesar 0,42% dari tahun 1999 menjadi 107,68% di tahun 2000, selanjutnya menurun lagi menjadi 107,21% di tahun 2001, kemudian menjadi 105,99% di tahun 2002.

Penurunan APS usia 13-15 tahun dan APK SD/MI akibat dari awal pemberlakuan *desentralisasi* pendidikan yang sempat membawa pro dan kontra, pemerintah pusat memberi otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya masing-masing. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum cakap sehingga penyelenggaraan pendidikan kurang berjalan efektif.

Periode tahun 2003-2008, APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, serta APK dan APM juga mengalami peningkatan karena kemampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi serta semakin meningkatnya anggaran pendidikan dan kucuran anggaran beasiswa bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi dan peningkatan mutu sekolah melalui program BOS yang dimulai tahun 2005.

Menjelang penuntasan target program wajib belajar 9 tahun di tahun 2008, kabupaten atau kota yang paling tinggi APK SMP-nya adalah Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Cilegon, Kota Palopo, Kota Jakarta Selatan, Kota Palangkaraya, Kota Bukittinggi, Kota Padang Sidempuan. Sementara 10 kabupaten/kota yang terendah APK SMP-nya dan dinyatakan belum tuntas karena APK SMP-nya kurang dari 80% adalah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Donggala, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara,

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Raja Ampat.

Fenomena *early entry* yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini berkontribusi pada sulitnya pencapaian target APM 100 persen pada jenjang SD/MI karena terdapat sebagian anak usia 6 tahun ke bawah sudah mulai bersekolah di SD/MI, bahkan sebagian anak usia 12 tahun sudah berada di jenjang SMP/MTs. Secara nasional, program wajib belajar 9 tahun dinyatakan tuntas pada tahun 2008 dengan indikator APK SD/MI sebesar 115,51% dan APK SMP/MTs sebesar 98,11%. Pencapaian tersebut dianggap sukses karena melampaui batas minimal Tuntas Paripurna sebesar 95%.

Berdasarkan angka partisipasi, secara umum partisipasi sekolah usia 7-15 tahun menunjukkan peningkatan dari awal pencanangan program wajib belajar 9 tahun pada tanggal 2 Mei 1994 sampai tahun 2008, meskipun diiringi pasang surut akibat permasalahan ekonomi dan politik di Indonesia dalam kurun waktu 1994-2008. Hal ini menunjukkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dalam menuntaskan anak usia 7-15 tahun.

PENUTUP

A. Simpulan

Indonesia dituntut mampu meningkatkan SDM Indonesia yang berkualitas, produktif, berIMTAQ dan berIPTEK dalam rangka menuju proses industrialisasi dan mewujudkan perekonomian Indonesia yang maju di tengah era globalisasi dan persaingan yang ketat antar bangsa-bangsa. Mayoritas tenaga kerja Indonesia hanya lulusan SD sehingga kinerjanya dinilai kurang produktif. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar lebih produktif adalah melalui jalan pendidikan secara bertahap, diawali dari pengentasan anak usia 7-15 tahun yang belum bersekolah agar bisa menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Alasan tersebut yang menjadi dasar pencanangan wajib belajar 9 tahun.

Hasil pemerataan dan perluasan pendidikan dari program wajib belajar 9 tahun dapat dilihat dari indikator pencapaiannya, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 1994 sampai 2008. APK SD/MI atau SMP/MTs adalah persentase jumlah seluruh murid pada satuan pendidikan tingkat SD/MI atau SMP/MTs terhadap jumlah anak usia sekolah 7-12 tahun atau 13-15 tahun.

B. Saran

Penulisan skripsi dengan judul "*Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia Periode 1994-2008*" telah membahas latar belakang dan tujuan pencanangan program wajib belajar 9 tahun, serta strategi sosialisasi beserta target dan sasaran selama pelaksanaannya. Penulisan skripsi ini juga menjelaskan usaha yang

¹⁵ H.M.Surya. Sabtu, 1 Mei 1999. Opini koran: "*Isu Desentralisasi Pendidikan*". Jakarta: Pikiran Rakyat, hlm. 8

dilakukan pemerintah dalam upaya penuntasan program wajib belajar 9 tahun disertai data pencapaian angka partisipasi sekolah. Selama kurun waktu 1994 sampai 2008.

Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang berminat untuk menulis tentang perkembangan program wajib belajar 9 tahun agar meneliti tentang kelemahan dari program tersebut selama pelaksanaannya serta solusi dalam mengatasinya. Penulis selanjutnya dapat memberikan terobosan tentang strategi perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, selain itu penulis selanjutnya dapat menganalisa kebijakan program wajib belajar 9 tahun sebagai bagian dari strategi politik penyelenggara negara ataukah implementasi dari teori *universal basic education*, bahkan mungkin wajib belajar di Indonesia diterapkan secara *compulsory*. Penelitian-penelitian lain yang mengambil tema tentang sejarah pendidikan, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 *tentang Pendidikan Dasar*.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1994 *tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 *tentang Wajib Belajar*.

B. Koran dan Artikel

Buwono, Sri, H. Edisi Oktober 2011 Vol. 2 No. 2. Jurnal pendidikan "*Suatu Pendekatan Sosialisasi dan Advokasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Kubu Raya*". Pontianak: Sosiologi dan Humaniora Universitas Tanjungpura.

Daliman, A. Edisi khusus dies Mei 1995 Vol. 17 No. 10. Jurnal pendidikan "*Gerakan wajib belajar sebagai realisasi prinsip pendidikan untuk semua, hakikat serta tantangannya*". Jakarta: Cakrawala

Harian umum Kompas. Senin, 2 Mei 1994. "*Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun: Masyarakat diimbau ikut biyai bangun gedung SMP*".

Harian umum Kompas. Senin, 2 Mei 1994. "*Tajuk Rencana: Sikap kritis mendukung program wajib belajar Sembilan tahun*".

Harian umum Kompas. Selasa, 3 Mei 1994. "*Presiden Tekankan, Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun Harus Sukses*".

H.M.Surya. Sabtu, 1 Mei 1999. Opini koran: "*Isu Desentralisasi Pendidikan*". Jakarta: Pikiran Rakyat.

Husin, M. edisi 18 Oktober 2005 vol. 5 no. 4. Jurnal pendidikan "*Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta*" Jakarta: Widayatama.

C. Bukudan Laporan

Kasdi, Aminuddin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.

Soedijarto, Prof. Dr. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas Media Sarana.

Tim BAPPENAS. 2007. *Laporan Perkembangan Pencapaian MDGs Indonesia 2007*. Jakarta: BAPPENAS.